

BAB II
KEADAAN SUMATERA BARAT DAN BENGKULU MENJELANG
KEMERDEKAAN

A. Sumatra Barat Menjelang Kemerdekaan

Keresidenan Sumatra Barat terletak di pesisir barat pulau Sumatra. Cikal bakal nama Sumatra Barat berasal dari zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). VOC menggunakan nama *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust* pertama kali sebagai sebutan untuk Sumatra Barat yang saat itu menjadi salah satu daerah administratifnya. VOC menyebut bahwa *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust* meliputi kawasan pantai barat bagian tengah Pulau Sumatra, tepatnya kawasan pesisir barat yang merentang mulai Barus di bagian utara hingga Indrapura di selatan.¹

Di Sumatra Barat suku Minangkabau merupakan suku terbesar dengan jumlah penduduk lebih kurang seperempat dari seluruh penduduk pulau Sumatra.² Populasi penduduk di Keresidenan Sumatra Barat selain suku Minangkabau, juga terdapat suku dan etnis lainnya. Suku Jawa, Batak, Sunda, dan suku-suku bangsa

¹ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatra Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 2-3.

² Data Sensus Tahun 1930 memperlihatkan bahwa suku Minangkabau merupakan 3,36% dari seluruh penduduk Indonesia; suku Jawa 47,2%, suku Sunda, 14,53%, dan suku Madura 7,28%. Suku Batak 2,04%, berada di urutan kelima setelah suku Minangkabau. Baca *Volkstelling 1930*, 1V, hlm 179-180.

lainnya. Kelompok suku lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit adalah suku Mandailing yang banyak menghuni wilayah Pasaman dan orang Jawa di Pasaman dan Sijunjung. Di Padang dan Pariaman, juga terdapat masyarakat Nias dan Tamil meski jumlahnya sangat kecil. Keturunan dari Negara Cina, Arab dan India juga terdapat di Sumatera Barat.

Penduduk Sumatera Barat sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, sebelum masuknya pengaruh asing. Hasil pertanian dan hasil hutan merupakan sumber ekonomi utama.³ Di daerah pegunungan secara berkala dibuka pasar-pasar yang dilakukan secara bergilir dari desa ke desa. Pasar bergilir ini disebut juga *pakan*⁴.

Di pulau Sumatera secara umum dan Keresidenan Sumatera Barat secara khusus, Jepang lebih menekan pasokan karet, minyak bumi, timah, batubara dan bauksit. Bahan-bahan mentah ini sangat vital dalam menunjang kegiatan industri dan militer Jepang. Pertanian dan perkebunan khususnya beras kurang mendapat prioritas dan terkesan terabaikan. Meski swasembada beras tetap dilakukan, tetapi sama halnya seperti di Jawa, beras hanya untuk mencukupi kebutuhan pemerintah

³ Mochtar Naim, *Merantau*, (Yogyakarta: Gajah Mada University ,1979), hlm. 16.

⁴ *Pakan* menurut dialek Minangkabau adalah pasar yang diadakan sekali seminggu pada hari tertentu.

Jepang dan dianggap tidak terlalu bisa menjadi penyangga kepentingan Jepang dalam menguasai Asia dan konflik di Pasifik.⁵

Perubahan konsep dikotomi Jawa dan Sumatera berdampak buruk bagi para petani. Petani banyak dipaksa untuk mengerjakan kepentingan Jepang, seperti memperbaiki landasan pesawat terbang di Bukittinggi (Gadut), di Payakumbuh, (Piobang) dan bergotong royong membuat jalan kereta api di Logas. Akibatnya banyak tanah persawahan dan ladang-ladang di Payakumbuh dan Solok penghasil tembakau serta cengkeh menjadi terlantar. Ada gejala ekonomi baru di masa pendudukan Jepang, yaitu munculnya pedagang-pedagang yang sama sekali tidak mempunyai toko dan kantor tetapi menguasai perdagangan pasar. Pedagang-pedagang ini disebut dengan istilah saudagar kilat atau pedagang keliling.⁶ Umumnya mereka berjualan dan mendatangi masyarakat, sistem dagang yang mereka lakukan adalah sistem *barter*.

Keresidenan Sumatera Barat adalah salah satu dari sedikit daerah administratif di masa pemerintah Hindia Belanda yang wilayahnya hampir identik dengan sebuah daerah budaya. Daerah budaya yang dimaksud adalah Minangkabau, suku mayoritas di Sumatera Barat. Daerah yang ditempati suku Minangkabau sering mereka namakan Ranah Minang yang meliputi hampir seluruh

⁵ Mestika Zed, *Giyugun: Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 14-15.

⁶ M.D. Mansoer, *op.cit.*, hlm. 12.

daerah Propinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau terdiri atas banyak marga atau *klan* tapi menganut sistem *matrilineal*, yang artinya garis keturunan ditarik dari pihak ibu.⁷ Keadaan ini menempatkan kaum wanita di Minangkabau dalam posisi yang istimewa, jika dibandingkan dengan kaum laik-laki.

Pemerintah Hindia Belanda pernah membagi dua wilayah pantai barat Sumatera, yaitu *Residentie Padang* yang membentang dari Singkel dan *Residentie Bengkulu* melanjutkan dari Indrapura hingga Croe. Dalam perkembangannya, *Residentie Padang* lalu dinamai *Residentie Padang en Onderhoorigheden dan Gouvernement van Sumatra's Westkust*. Kekuasaan *residentie* (residen) tidak terbatas pada bidang administrasi pemerintahan saja, melainkan juga dalam bidang kepolisian dan hukum. Pelaksanaan pemerintahan residen dibantu oleh Asisten Residen, Demang, Sekretaris Daerah, Panitia, *Ambternaar* Residen, Kepolisian dan Wedana. Keresidenan Sumatera Barat (*Residentie Padang*) dibagi lagi menjadi empat wilayah administratif setingkat Kabupaten (*afdeeling*) dan dua kota madya (*staadsgemeente*). Keempat *afdeeling* tersebut adalah *Afdeeling Zuid Benedenlanden*, *Afdeeling Tanah Datar*, *Afdeeling Lima Puluh Kota* dan *Afdelling Solok*. Sedangkan dua *staadsgemeente* adalah Padang dan *Fort de Kock*. Masing masing *afdeeling* mempunyai bawahan dengan jabatan *onder afdeeling*, tatanan administratif ini berbeda dengan yang pemerintah Hindia Belanda lakukan di Jawa

⁷ Hazairin, *Hendak kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1960), hlm. 7.

dan Madura. *Onder afdeeling* tidak ada di dua wilayah tersebut, yang ada adalah wedana langsung yang menjadi bawahan *afdeeling*.⁸

Pada 1938 di Keresidenan Sumatera Barat pemerintah Hindia Belanda membentuk satu dewan lembaga sebagai penasehat yang diberi nama Minangkabau *Raad* yang diketuai oleh orang Belanda dan sekretarisnya adalah orang Indonesia. Meskipun orang bumiputera banyak menduduki posisi di dalam dewan penasehat itu tidak berarti mereka dapat menyuarakan suara pribumi secara bebas. Pemerintah Hindia Belanda melarang dan membatasi isu-isu yang boleh dibicarakan dalam rapat dewan. Tidak aneh jika banyak usul pribumi Minangkabau yang ditolak atau tidak dianggap.⁹

Tentara Jepang memasuki kota Padang pada 17 Maret 1942 dan sepuluh hari kemudian komandan militer Hindia Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat. Mulai bulan September 1942 Jepang terlihat serius membangun kekuatan di Keresidenan Sumatera Barat. Sumatera tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan yang berpusat di Jawa seperti yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Pada mulanya Sumatera digabung bersama Semenanjung Malaya yang diatur langsung

⁸ Trade D.P., *Sungai Puar*, (Jakarta: Yayasan Sungai Puar, 1966), hlm. 1.

⁹ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 19 dan hlm. 43-44.

oleh Departemen Pemerintahan (*Gunseibu*) Tentara Angkatan Darat ke-25.¹⁰ Jepang lalu membentuk satu pemerintah militer (pemerintah pendudukan) mengingat keadaan darurat perang saat itu dan menyusun kekuatan pemerintahannya di Indonesia sesuai dengan pasukan yang berhasil menguasai daerah tertentu.

Dampak dari pembagian wilayah militer ini adalah, munculnya pengaturan pemerintah di daerah yang beraneka ragam dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya disesuaikan dengan kepentingan angkatan perang Jepang. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang Jepang memutuskan untuk melanjutkan sistem administrasi Hindia Belanda dengan merekrut kembali *ambtenaar* lama, tetapi Jepang tetap menyusupkan beberapa perubahan kecil. Perubahan yang terlihat jelas adalah dalam hal nama kesatuan administratif¹¹ menjadi nama berbahasa Jepang. Jepang juga membentuk aparatur pemerintahannya di Sumatera Barat yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Susunan struktur pemerintahan di Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang adalah:¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

¹¹ Keresidenan menjadi *Syuu* dan residen menjadi *Syucokan*, Kabupaten menjadi *Ken* dan Bupati menjadi *Ken-co*, Kotamadya menjadi *Si* dan Walikota menjadi *Si-co*, Kewedanaan menjadi *Gun* dan Wedana menjadi *Gun-co*, Kecamatan menjadi *Son* dan Camat menjadi *Son-Co* serta Desa menjadi *Ku* dan Kepala Desa menjadi *Ku-Co*. Baca Depdikbud (1998), *op.cit.*, hlm. 24.

¹² Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 47.

- 1) *Sumatera Neishi Kaigon Syu* (Keresidenan Sumatera Barat) dikepalai oleh *Syukocan*.
- 2) *Bun (Luhak* atau *afdeeling*) dikepalai oleh *Bun-Syuco*.
- 3) *Fuku-Bun (Onder afdeeling/* distrik) dikepalai oleh *Fuku-bun-co*.
- 4) *Gun (Onder Distrik)* dikepalai oleh *Gun-co*.
- 5) *Fuku-Gun* (Kecamatan) dikepalai oleh *Fuku-gun-co*.
- 6) *Negari* (Kepala Negeri).

Masuk pada fase terakhir pemerintahan Jepang di Indonesia, tahun 1944 Jepang terus mengalami kemunduran dalam pertahanan militer akibat perang dahsyat di Pasifik. Keadaan ini memaksa Jepang untuk mengambil langkahlangkah politik dalam rangka menarik dukungan dari politisi dan rakyat Indonesia. Tanggal 7 September 1944 lewat Deklarasi Koiso, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Tetapi tentara Jepang yang berada di Bukittinggi menolak atas dimasukkannya Sumatera dalam perjanjian wilayah yang dijanjikan seperti yang dimuat dalam Deklarai Koiso, tentara Jepang tetap berjuang mempertahankan kekuasaannya sampai menjelang akhir kemerdekaan Indonesia.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 151.

B. Bengkulu Menjelang Kemerdekaan

Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat dan Jambi di sebelah utara. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Sumatera Selatan. Lampung menjadi batas bagian selatan dari Bengkulu. Sebelah barat, Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sepanjang bagian sebelah timur ibukota Bengkulu terdapat jajaran pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Sumatera di sebelah selatan sampai ke ujung sebelah utara. Pemukiman penduduk ditemukan di celah-celah pegunungan Bukit Barisan yaitu Ketahun (*Ketahunvlakte*) dan Kaba (*Kabavlakate*).¹⁴ Pemukiman penduduk tersebut dihuni oleh suku bangsa Rejang yang merupakan suku asli terbesar di Bengkulu.¹⁵

Perkenalan administrasi pemerintahan militer di Sumatera dimulai pada September 1942.¹⁶ Pulau Sumatera diatur oleh pemerintah militer Tentara ke-25 di Singapura. Penggabungan ini mencerminkan visi Jepang di bidang militer dan

¹⁴ Ranni, M. Z, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 21.

¹⁵ Suku asli di Bengkulu yaitu: suku Rejang (Rejang Pegunungan di daerah Lebong dan Rejang Pesisir di daerah Lais), suku Serawai di daerah Selumah dan Manna, suku Lembak di wilayah *Ommelanden* (Kerjaan Sungai Itam) dan suku Pasemah di daerah Pasemah Ulu Manna. Tim Monografi Daerah Bengkulu, *Daerah Monografi Daerah Bengkulu Jilid 1*, Jakarta: Proyek Pembangunan Media Kebudayaan, Depdikbud, 1986), hlm. 4-48.

¹⁶ Mestika Zed, *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm 233.

ekonomi. Dari bidang militer, ini menjadi cermin taktik perang Jepang. Jepang memperkirakan ancaman musuh (Sekutu) datang dari perairan Selat Malaka. Pertahanan utama Jepang terletak di kawasan tersebut, sehingga penggabungan Sumatera dan Semenanjung Malaka menjadi utama bagi Jepang.

Jepang menyusun pemerintahan permanen di Sumatera sejak September 1942. Jumlah orang Jepang, baik sipil maupun militer lebih banyak di Sumatera waktu itu sekitar 75.000 orang, lebih banyak ketimbang di Jawa.¹⁷ Mereka masih mengikuti “warisan” susunan administrasi pemerintah Hindia Belanda, tapi dengan istilah bahasa Jepang.

Kebijakan yang dilaksanakan penguasa militer Jepang di Sumatera adalah politik isolasi. Kebijakan tersebut membuat kedudukan *shu* menjadi sangat penting. Setiap *shu* diharuskan mencukupi segala kebutuhan militer Jepang, juga diwajibkan memecahkan masalahnya sendiri, baik di bidang swasembada ekonomi maupun bidang pergerakan politik lokal.

Tujuan ekonomi jauh lebih penting bagi Jepang ketimbang membangun kerjasama politik. Jepang berusaha memanfaatkan sumber daya yang dianggap strategis tanpa melakukan perundingan dengan penduduk lokal. Mereka menyita semua “warisan” Hindia Belanda, baik bangunan maupun perkebunan. Setiap orang yang dianggap menghambat atau menghalangi pengambilan kekuasaan dan

¹⁷*Ibid.*, hlm 234.

kekayaan pemerintah Hindia Belanda dihadapkan dengan hukuman keras. Hal ini dialami oleh Residen Bengkulu C. E. Maier. Dia disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Jepang dengan tuduhan menghancurkan semua “brandkas” dan dokumen karesidenan.¹⁸

Perekonomian Bengkulu bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan karena Jepang menguasai perekonomian dengan jalan monopoli. Mereka mengatur pembelian, penjualan dan pembagian hasil produksi yang diperoleh dari dan oleh rakyat.¹⁹ Keadaan ini semakin parah karena Jepang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan rakyat.²⁰ Tidak ada kegiatan perekonomian yang berarti, yang terjadi adalah barter antara *Syucokan* dengan *Sangyobu* (Departemen Perekonomian).²¹

¹⁸Tidak hanya Maier yang disiksa oleh Jepang, Residen Lampung G. W. Meindesma juga dibunuh dengan tuduhan yang sama. Nasib yang sama juga menimpa Sekretaris Residen Palembang Dr. W. F. Weddik yang tewas akibat disiksa Jepang. Sednagkan Residen Palembang A. Oranje hanya dimasukkan ke dalam penjara. Mestika, *Kepialangan.., op.cit.*, hlm. 237. Baca juga, McDougall, W.M.H., *By Eastern Windows: The Story of Battle of Souls and Minds in The Prison Camps of Sumatera*, (London: Arthut Barker, Ltd. 1951), hlm. 261.

¹⁹Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, *op.cit.*, hlm. 85.

²⁰Moedjanto, G., *op.cit.*, hlm. 75. Buruknya hubungan Jepang menjadi penyebab lahirnya romusha.

²¹*Ibid.*,

Tiap petani dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada pemerintah Jepang dengan harga atau ganti rugi yang rendah.²² Tiap hari selalu ada pegawai Jepang yang datang untuk mengangkut beras dari rakyat, dengan menggunakan delman atau gerobak. Beras tersebut disimpan di gudang persediaan Jepang dan nantinya dikirim ke daerah-daerah perang Jepang.²³ Untuk memenuhi kebutuhan mereka, para petani mengakalnya dengan menyelundupkan beras ke lumbung yang mereka bangun di hutan. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena *Kempeitai* mengetahui keberadaan lumbung tersebut dan segera membakarnya.²⁴

Komoditas baru yang diwajibkan untuk ditanam oleh Jepang adalah palawija dan pohon jarak.²⁵ Tanam lain yang dipaksa untuk ditanam adalah kapas, randu dan rami.²⁶ Peraturan tersebut diberlakukan di semua perkebunan yang ada di

²²Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, *loc.cit.*,

²³Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bengkulu, *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm 168.

²⁴Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *op.cit.*, hlm. 86.

²⁵Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bengkulu, *op.cit.*, hlm 169. Anak-anak juga diwajibkan untuk menanam palawija dan pohon jarak.

²⁶Moedjanto, G, *op.cit.*, hlm 77.

wilayah Bengkulu. Akibat alam dan jenis tanaman yang tidak cocok, hasil pertanian di Bengkulu terus menurun dan perekonomian rakyat kian meredup.

Sejak pertengahan 1943, Jepang mendesak diadakan program pengerahan tenaga kerja massal yang ketika itu dikenal dengan tenaga kuli *romusha*. Tenaga kerja ini bertugas untuk menggarap perkebunan dan juga membangun sarana prasarana di Bengkulu. Program tersebut diurus oleh Badan Pembantu Pemerintah (BPP) atau Boeroeh Pembantoe Pemerintah.²⁷ Badan yang tersebar di setiap daerah kecamatan itu dikoordinasikan oleh *gunco* dan *fuku-gunco*. Mereka berdua adalah penentu utama dalam pengerahan *romusha*.

Tenaga kerja BPP dikerahkan untuk membangun lapangan terbang di Padang Panjang dan juga Talang Betutu, Palembang. Ada juga yang dikirim ke Pulau Enggano untuk membangun fasilitas pemerintahan di sana. Sebagian tenaga kerja BPP Bengkulu juga dikirim ke luar negeri seperti Burma dan Thailand untuk membangun barak dan kubu pertahanan di sana.

Romusha yang dikirim biasanya ditugaskan untuk memperbaiki atau membangun proyek perang Jepang, seperti jalan dan jembatan serta lubang perlindungan. Tenaga *romusha* dipusatkan di Pulau Enggano. Pulau tersebut dijadikan kubu pertahanan sekaligus gudang persenjataan pernan Jepang. Tenaga *romusha* juga banyak dibutuhkan untuk pembangunan pangkalan udara di Curup,

²⁷Lapian, A.B. & Soewadji Sjafei, *op.cit.*, hlm. 116.

Padang Panjang dan Kota Manna. Lapangan terbang Padang Kemiling yang ada di Kota Bengkulu adalah hasil kerja *romusha* pada masa pemerintahan militer Jepang.²⁸

Pemerintah Jepang dengan sengaja mempertontonkan kekerasan di depan umum, seperti saat mereka menghukum warga yang tidak menyetor tangkapan ikan. Pemimpin pergerakan di Bengkulu merasa pesimis melihat tindakan tersebut. Jepang menyatakan ini cara mereka menghina dan memupuk rasa benci terhadap Sekutu.²⁹ Seperti yang terjadi di Palembang, beberapa minggu saja setelah menduduki Palembang, Sukarno dalam bukunya menuliskan “...with my own eyes I’ve seen them repeatedly slap Indonesians...” (di depan mata saya sendiri saya menyaksikan mereka berulang kali menampar orang Indonesia).³⁰ Sebagian besar tokoh pergerakan di Bengkulu, baik dari kalangan Parindra maupun Muhammadiyah jarang tampil di muka umum. Mereka lebih banyak bersembunyi, menghindari kontak langsung dengan badan mata-mata Jepang atau polisi militer Jepang.

Sebelum kepergiannya dari Bengkulu, Sukarno telah banyak mengembangkan kaum pergerakan. “Panitia Korban Perang” (Pekope) didirikan oleh Sukarno dan para teman seperjuangannya di Bengkulu. Badan ini bertujuan

²⁸Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bengkulu, *op.cit.*, hlm 172.

²⁹Mestika, *Kepialangan..loc.cit.*,

³⁰*Ibid.*, hlm. 238.

membagikan bahan pokok yang makin sulit ditemukan di pasar dan kalau pun ada semakin mahal harganya. Badan ini bermarkas di Sekolah Muhammadiyah di Kebun Ros, Kota Bengkulu.

Tidak lama setelah Pekope berdiri, Sukarno dijemput paksa oleh polisi. Sukarno dijemput paksa dan dibawa ke benteng karena ada sesuatu hal yang penting. Seorang anggota Pekope, Hamdan Mahyoedin mengatakan, “Bung, jangan tinggalkan kami.” Setelah itu tidak ada terdengar kabar tentang Sukarno.³¹

Hanya ada dua organisasi yang tetap bertahan di masa pemerintahan militer Jepang yaitu Pekope dan Pemuda Angkatan Baru (PAB). PAB lahir dari gabungan organisasi olahraga dan musik yang ada di Bengkulu.³² PAB memang bukan organisasi resmi pemerintah, namun mendapat dukungan penuh dari pemerintah militer Jepang. Mereka melihat PAB tidak merusak totaliterisme di Bengkulu. Pekope yang didirikan Bung Karno semasa pengasingannya juga bukan organisasi resmi pemerintah. Namun mendapat ijin dari pemerintah militer Jepang kerana bergerak di bidang kemanusiaan.

Tujuan PAB adalah mengikat hubungan antar sesama pemuda dan pelajar untuk saling dapat memberi informasi dan berdiskusi segala hal yang perlu

³¹Boerhan Wahid, *Bung Karno di Mata Seorang Bocah* (Naskah ketikan, Bengkulu 1997), hlm. 20. Boerhan Wahid adalah anak asuh Bung Karno dan juga anggota PKR.

³²Pemerintah militer Jepang di Bengkulu hanya mengizinkan kegiatan kesenian dan olahraga yang tetap berkembang. Ranni, *op.cit.*, hlm. 39.

diketahui. Pada awalnya, mereka yang tergabung dalam PAB adalah pemuda yang bergerak di organisasi kesenian, olahraga, sosial dan ekonomi. PAB sudah berdiri sejak awal Perang Pasifik. Anggota PAB adalah mereka yang pernah tergabung dalam organisasi mata-mata *Tokomu Kikan*. Organisasi ini dibentuk untuk memperlancar operasi pendudukan Jepang. Cabang *Tokomu Kikan* di Bengkulu dipimpin oleh Matsukawa, kapten dari *Nakano Gakko*.³³ Organisasi ini sangat diandalkan Jepang dalam invasinya ke Bengkulu.

Jepang membubarkan organisasi tersebut setelah berhasil menguasai Bengkulu. Mereka juga tidak sepenuhnya dilepas oleh Jepang. Akhir 1942, mereka direkrut lagi untuk masuk ke dalam *Hodohan*,³⁴ badan propaganda Jepang yang merupakan bagian dari *Kempeitai* yang semua anggotanya orang Jepang. Perbedaannya, *Hodohan* berfungsi sebagai informan politik bagi Jepang, sekaligus menyuarakan semangat militerisme, sedangkan *Kempeitai* bertugas menyelidiki dan menjatuhkan hukuman bagi “musuh” atau setiap unsur yang melanggar peraturan perang Jepang.

PAB secara bergantian dipimpin oleh M.Z. Ranni, Maurice Umar, Tabarani Kader, Amin Kaum dan Kemas Anwar Sulaiman. Mereka yang dianggap

³³*Nakako Gakko* (Sekolah Intelijen Militer) yang dibentuk secara mendadak pada awal 1940 merupakan bagian inheren *Imperial Army* (Tentara Kemaharajaan) Jepang.

³⁴Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bengkulu, *op.cit.*, hlm. 172.

bertindak terlampau jauh, menurut ukuran Jepang, pasti dihukum berat bahkan menjalani hukuman mati. Ada beberapa tokoh PAB yang terpaksa berurusan dengan pihak Jepang. A. Rivai Darwis dijemput paksa pagi-pagi buta dari rumahnya oleh anggota *Kempeitai*, dengan pedang terhunus. Dia disangka menyusun rencana perlawanan terhadap Jepang. Setelah diperiksa *Kempeitai* barulah dia dibebaskan. Abubisin dan Sucipto, anggota PAB yang berada di Curup juga ditangkap *Kempeitai* dengan dugaan yang sama. Mereka akhirnya dipenjarakan di Kota Bengkulu.³⁵

Kempeitai juga menangkap satu perkumpulan di daerah Alas, Puyang Serunting. Perkumpulan ini dituding tidak menjalankan peraturan yang ditetapkan Jepang. Mereka juga menyusun rencana pemberontakan. Baik perempuan dan laki-laki, ibu dan bapak, semua diangkut menggunakan truk oleh anggota *Kempeitai* dan dibawa ke Kota Bengkulu. Mereka diinterogasi terkait kegiatan yang mereka lakukan dan apa tujuan mereka. Tidak butuh waktu yang lama untuk Jepang mengetahui siapa dalang Puyang Serunting. Jenuk yang merupakan anggota PAB dan pemimpin perkumpulan tersebut dibunuh oleh Jepang. Anggota lainnya yang merupakan penduduk Alas dipulangkan oleh *Kempeitai*.³⁶

Jepang juga menangkap Zaennudin, mantan ajung jaksa dan mantan kepala penjara di Kota Bengkulu. Dia diambil secara paksa dari rumahnya oleh Jepang.

³⁵Ranni, *op.cit.*, hlm. 42

³⁶*Ibid.*,

Tidak ada yang mengetahui alasan penangkapan Zaennudin. Setelah penangkapan tersebut, tidak ada kabar apapun tentangnya. Hingga akhir pemerintahan Jepang, Pekope dan PAB tetap bertahan. Hanya saja PAB lebih banyak melakukan aksi pemberontakan karena sistem pemerintahan militer Jepang. PAB juga melakukan rapat secara diam-diam supaya tidak tertangkap oleh *Kempeitai*. Organisasi ini menjadi wadah tokoh pergerakan Bengkulu dan para pemuda hingga awal kemerdekaan.

Jepang juga merekrut kaum muda untuk dilatih dan dididik di bidang kemiliteran. Badan militer pertama yang dibentuk adalah *Heiho*. Pembentukan badan tersebut dirintis sejak sekitar bulan Mei hingga Juni 1943 seiring dengan pengumuman *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer Jepang) yang disebar di setiap *shu*. Tingkatan yang kedua adalah *Giyûgun*. Pelatihan militer organisasi ini sama dengan PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa.

Rekrutmen kader militer yang paling bergensi dan lebih tinggi daripada *Heiho* adalah *Giyûgun*, laskar rakyat. Tatacara perekrutan calon *Giyûgun* diatur oleh *Gunseikanbu* Sumatera di Bukittinggi pada akhir 1943, hampir bersamaan dengan pembentukan “Pembela Tanah Air” (PETA) di Jawa.³⁷ Pusat pelatihan *Giyûgun* di Sumatera tersebar di setiap wilayah karesidenan: satu di Aceh, satu di Sumatera Timur, dua di Sumatera Barat (Bukittinggi dan Padang) dan dua di

³⁷ Tentang PETA lihat Nugroho Susanto, *The PETA Army during the Japanese Occupation of Indonesia* (Tokyo: Waseda University Press, 1979).

Palembang. Tiap pusat pelatihan tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Pusat pelatihan yang pertama dibuka di Bukittinggi sekitar bulan Oktober 1943, kemudian Aceh dan Sumatera Timur satu bulan kemudian dan di Palembang pada 13 November 1943.³⁸

Pusat pendidikan militer *Giyûgun* Bengkulu berada di dua tempat. Pusat pendidikan di Pagar Alam mengumpulkan calon dari *shu* yang berada di seluruh Sumatera Selatan (Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka). Sebagian besar yang kemudian diterima memang pernah mendapat pendidikan sekolah menengah Belanda, anak-anak *pasirah* dan terkadang *pasirah* tersendiri. Sebagian kecil yang diterima adalah pemuda yang bekerja sebagai guru dan cerdik pandai (pegawai rendahan). Karesidenan Bengkulu mengikutsertakan 60 orang pada penerimaan pertama pada November 1943 dan menerima pelatihan di kaki Gunung Dempo, Pagar Alam.

Selain pendidikan militer, mereka juga mendapatkan pendidikan dari tokoh pergerakan yang memasukkan unsur nasionalisme tanpa diketahui Jepang. Selama pendidikan, utusan Karesidenan Bengkulu ditempatkan di bangsal rumah sakit

³⁸Lapian, A.B. dan J.R. Chaniago (eds.), *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988).

Pagar Alam yang dipimpin *Kawaida Butai*. Para Perwira menjalani pendidikan di Pagar Alam selama tiga bulan.³⁹

Para perwira diberi pangkat masing-masing, dari letnan dua, letnan muda, serma dan kopral. Tiap komandan regu menerima pendidikan lanjutan yaitu pendidikan tentang senapan mesin dan meriam. Mereka yang telah berhasil mengikuti *minaraishikan* (calon perwira) yang telah menjadi *shoi* (letnan dua) berhak memiliki pedang panjang samurai serta baju jas hijau. Sementara *jungji* (pembantu letnan) diberikan pedang kelewang panjang bekas Belanda. Mereka juga mendapatkan pelajaran tentang taktik militer, pengaturan logistik dan *renraku* (koordinasi perhubungan). Setelah masa pendidikan, dilakukan pembentukan kesatuan dan pembagian lokasi. Karesidenan Bengkulu mempunyai dua *cutai* (kompi) yaitu Suban Ayam-Curup/Lais atau *Tonooka Tai* dan *cutai* Bengkulu atau *Nakani Tai*.⁴⁰

Tentara *Giyûgun* dan *Heiho* tidak pernah mengalami peperangan yang sebenarnya. Mereka hanya diberi pelatihan dan kubu pertahanan. Mereka diperintahkan Jepang untuk membangun kubu-kubu pertahanan, setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Pagar Alam. Sepanjang tahun 1944, mereka bekerja

³⁹Siti Rohana, *Perjuangan Rakyat Rejang Lebong dalam Mempertahankan Kemerdekaan tahun 1945-1949*, (Padang: BPSNT Padang Press, 2004), hlm. 33.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 34.

membangun kubu pertahanan dan bunker bawah tanah di sepanjang pantai dari Bintuhan hingga Mukomuko.

Mereka tidak kecewa karena tidak menyerang Sekutu. Mereka sudah mendapatkan pengetahuan militer yang diajarkan Jepang dan mempunyai semangat kejepangan yang halus dan keras. Namun mereka tetap mempunyai semangat pergerakan. Patriotisme yang ditanamkan beberapa pemimpin pergerakan kepada para perwira *Giyûgun* itu tertuang dalam kalimat, “*Giyûgun* bukanlah tentara Jepang, melainkan tentara Indonesia.”⁴¹ Nantinya, perwira *Giyûgun* dan *Heiho* mendominasi keanggotaan PKR di Bengkulu.

Perilaku pemerintah militer Jepang pada bulan-bulan terakhir pendudukan nampak tidak menentu. Sejak Sekutu melancarkan serangan bom pada akhir tahun 1944, keadaan Bengkulu mulai tidak aman. Pulau Enggano menjadi sasaran utama karena merupakan kubu pertahanan Jepang. Ketika itu perbaikan kubu pertahanan di Pulau Enggano belum selesai, Sekutu sudah melancarkan serangan bom lagi di awal tahun 1945 dan sasarannya adalah Kota Manna.⁴²

Serangan beruntun Sekutu dari laut dan udara terjadi pada Februari 1945. Kapal induk Sekutu yang berpangkalan di Pulau Pagai mengirim armada ke Pantai

⁴¹Mestika, *Giyûgun.., op.cit.*, hlm. 268.

⁴² Seno dkk, *Bunga Rampai Sejarah Bengkulu. Bengkulu dari Masa Kolonial hingga Era Otonomi Daerah*, (Padang: BPSNT Padang Press, 2012), hlm. 44.

Panjang. Meriam kapal tersebut mengenai sasaran, kapal Jepang yang ada di dermaga. Akibatnya, satu tanki penyimpanan BPM Jepang hangus terbakar.

Secara mendadak, Jepang memindahkan gudang senjata dan amunisi mereka dari Kota Bengkulu ke Kepahiang. Pesawat radio yang dipasang di setiap persimpangan jalan diberhentikan. Gudang persediaan dibongkar, segala macam barang dijual, dengan harga yang sangat murah. Koran *Bengkulu Shimbun* terbitan Januari 1945 di Bengkulu masih tetap meyakinkan rakyat Bengkulu dengan pernyataan bahwa “kemenangan terakhir pasti di pihak kita (Jepang)”⁴³

Janji kemerdekaan Indonesia juga tidak bisa dikesampingkan, setelah diumumkannya pembentukan *Chuo Sangi In*. “Dewan Penasihat” tingkat Sumatera berhasil menyusun keanggotaannya secara lengkap pada bulan Mei 1945. Jumlah anggota sebanyak 40 orang terdiri dari 15 orang yang dipilih *Shu Sangi Kai* (wakil karesidenan) dan sisanya diangkat oleh pemerintah militer Jepang. Selang dua bulan, pada 26 Juli 1945, dewan tersebut mengadakan sidang pertama di Bukittinggi. M. Ali Chanafiah menjadi perwakilan dari Bengkulu. Satu-satunya fungsi nyata Dewan ini adalah menyediakan tempat pertemuan bagi wakil-wakil dari berbagai daerah di Sumatera, beberapa di antara mereka baru bertemu pertama kali sejak Jepang berkuasa. Mohammad Syafei (Ketua; dari Sumatera Barat),

⁴³*Ibid.*

Teuku Nyak Arif (Wakil Ketua dari Aceh)⁴⁴ dan Mr. Abdul Abbas (Wakil Ketua dari Lampung)⁴⁵ adalah pemimpin Dewan yang diangkat oleh Jepang. Mereka disegani dan diterima oleh anggota dewan lainnya. Latar belakang pimpinan Dewan memang sangat beragam. Misalnya, Djamaluddin Adinegoro yang menjabat Sekretaris Dewan, adalah seorang wartawan senior asal Sumatera Barat yang pernah bekerja di Sumatera Timur.⁴⁶

Kantor berita *Domei* di Bengkulu yang dijalankan oleh *Hodohan* dan juga orang Indonesia, sejak awal Agustus 1945 ditutup. R. Abdullah yang bertugas di kantor kawat (PTTR) secara sembunyi-sembunyi mengoperasikan pemancar radio. Melalui Abdullah, berita dan perkembangan Perang Pasifiik dapat diketahui oleh

⁴⁴Teuku Nyak Arif (1900-1946) berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Dia jarang melakukan kompromi dengan Jepang. Pemerintah pusat Republik Indonesia mengangkatnya sebagai Residen Republik pertama di Aceh sebelum “Revolusi Sosial” meletus pada Desember 1945. Anthony Reid, “The Birth of The Republic in Sumatra”, dalam *Indonesia*, No. 12 (Oktober 1973), hlm 27.

⁴⁵Mr. Abdul Abbas yang lahir pada 1901 adalah putra Tapanuli Selatan. Tamat kuliah di fakultas hukum Leiden, dia bekerja di Lampung. Dia tampil sebagai tokoh Parindra sejak sebelum perang di daerah itu. Pada masa pendudukan Jepang, dia menjabat sebagai Ketua *Shu Sangi Kai* Lampung. Kemudian dia diangkat sebagai Residen Lampung pertama sebelum “aksi daulat” pemuda sebelum September 1946. Reid, *Ibid.*,

⁴⁶Djamaluddin Adinegoro lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat pada 1903. Pada masa pendudukan Jepang, dia diangkat sebagai editor surat kabar *Sumatora Shimbun* (kemudian berubah nama menjadi *Kita-Sumatora-Shimbun*) dan menjadi Wakil Ketua *Chuo Sangi Kai* Sumatera Timur. Reid, *Ibid.*, hlm, 28.

kaum pergerakan di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut mampu memberi ruang gerak dan udara segar atas kegiatan sensor yang diberlakukan Jepang.⁴⁷

Pemisahan satu daerah dengan daerah lain yang ada di Sumatera, telah mendorong perkembangan pergerakan lokal dan kekuatan daerah itu sendiri. Perbedaan menyolok antara *Shu Sangi Kai* di tiap daerah, serta organisasi pendukung *Giyûgun* khususnya, mempunyai pengaruh yang penting terhadap karakteristik pergerakan nasional di Sumatera. Pemerintah bumiputera memang masih lemas dan masih sedikit tokoh pergerakan yang berani tampil pada masa pemerintahan militer Jepang, baik di Bengkulu juga di wilayah lain di Sumatera. Namun, pada akhirnya, keterasingan malah menjadi alasan untuk berjuang untuk pembebasan dari Jepang.

⁴⁷Siti Rohana dkk, *op.cit.*, hlm. 41.